

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi termasuk tenaga profesi, pelaksana konstruksi, juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri (Hillebrandt, 1985). Dibandingkan dengan industri lain, misalnya industri pabrikan (*manufacture*), maka bidang konstruksi mempunyai karakteristik yang sangat spesifik dan unik. Bahkan karakteristik pada setiap proyek konstruksi itu sendiri sudah spesifik dan unik, dimana setiap proyek menghadirkan persoalan yang berbeda pada setiap proses pengerjaannya. Proses yang terjadi pada suatu proyek tidak akan berulang pada proyek lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi proses suatu proyek konstruksi berbeda satu sama lain (Ervianto, 2004). Karakteristik-karakteristik ini yang menyebabkan kondisi proyek konstruksi berbahaya dan rawan terjadi kecelakaan kerja.

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia sebenarnya telah lama mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah sejak ditetapkannya Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Bahkan sejak tahun 1993, keselamatan kerja telah ditingkatkan untuk mencapai kecelakaan nihil (*zero accident*) pada setiap proses produksi. Sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai keselamatan kerja, perusahaan kontraktor wajib mengimplementasikan Program Keselamatan

Kerja dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap proyek konstruksi yang dikerjakannya. Hal yang sangat disayangkan adalah penerapan peraturan tersebut di lapangan. Sepanjang tahun 2013, sebanyak 12.745 perusahaan melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja (Suara Pembaharuan, 2014). Minimnya jumlah perusahaan yang menerapkan program K3 sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat diabaikannya Sistem Manajemen K3, besarnya mencapai lebih dari 139,6 milyar rupiah di tahun 2012, itupun hanya untuk wilayah Jawa Barat dan Banten (Afdiwar Anwar, 2013).

Ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu terjadi karena belum adanya pengetahuan dari majikan dan para pekerja (Gerard Hand, 2013). King and Hudson (1985) menyatakan bahwa proyek konstruksi di negara-negara berkembang, terdapat tiga kali lipat tingkat kematian dibandingkan dengan di negara-negara maju. Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk yang paling tinggi di kawasan ASEAN. Pada tahun 2010, Depnakertrans mencatat terdapat 86.693 kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia, dimana 31,9% terjadi di sektor konstruksi, 31,6% terjadi di sektor pabrikan (*manufacture*), 9,3% di sektor transportasi, 3,6% di sektor kehutanan, 2,6% di sektor pertambangan, dan 20% di sektor lain-lain (Jamsostek, 2011).

Sektor konstruksi menempati urutan tertinggi dalam kecelakaan kerja, yakni hampir 32%.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara utuh dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Namun, pada kenyataannya masih banyak hambatan yang sering dihadapi, baik dari pihak perusahaan seperti yang terpapar di atas maupun dari pihak pekerja. Kecelakaan kerja kebanyakan terjadi dikarenakan faktor perilaku tidak aman (*unsafe act*) oleh pekerja karena kurangnya pengetahuan mereka tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3). Silalahi (1995) mengungkapkan, berdasarkan data statistik di Indonesia 80% kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan 20% oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*). Hal ini berarti perilaku tidak aman (*unsafe act*) berpengaruh besar terhadap kecelakaan kerja dibandingkan dengan kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

Pelaksanaan suatu proyek konstruksi sangat berorientasi pada tenaga kerja manusia. Pada tahun 2009 saja, menurut data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menunjukkan bahwa sekitar 4,5 juta tenaga kerja di Indonesia bekerja pada sektor konstruksi, mencakup 7-8% dari jumlah tenaga kerja di semua sektor, dimana 53% diantaranya hanya mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar dan bahkan sekitar 1,5% tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Selain itu pula, sebagian besar dari mereka berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan.

Kenyataan seperti ini tentunya mempersulit penanganan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang biasanya dilakukan dengan metoda pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi dan juga berpotensi mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan menjadi resiko.

Dalam menghadapi persaingan pasar bebas, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif yang harus dipersiapkan oleh perusahaan-perusahaan jasa konstruksi, baik swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai macam perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja manajemen sehingga dapat menghasilkan suatu sistem bisnis perusahaan jasa konstruksi yang ideal (Sudarto, 2003). AFTA (ASEAN Free Trade Area) akan mulai berlaku pada tahun 2015. AFTA merupakan kesepakatan dari negara – negara di ASEAN untuk membentuk sebuah kawasan bebas perdagangan. Tujuannya agar bisa meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN di dunia. Tetapi persoalannya adalah, jika industri konstruksi di Indonesia masih belum melaksanakan program K3 secara utuh, industri konstruksi di Indonesia akan terancam gagal bersaing dengan industri-industri konstruksi di ASEAN apalagi dunia.

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Pemerintah sudah mengeluarkan UU no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan yang seharusnya sudah dijadikan oleh perusahaan konstruksi sebagai acuan tentang standar keselamatan kerja. Namun sangat disayangkan penerapan peraturan tersebut belum berjalan secara utuh dan maksimal di lapangan.

1. Bagaimanakah kondisi dan perilaku pekerja konstruksi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan proyek konstruksi?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pekerja dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan proyek konstruksi?

Batasan masalah dari penulisan proposal tugas akhir ini agar tidak menyimpang dari tujuan awal adalah sebagai berikut: Penelitian ini tentang analisis kondisi dan perilaku tidak aman pekerja konstruksi, dilakukan selama bulan Oktober 2014 pada pekerja konstruksi di proyek Pembangunan Sahid Jogja Lifestyle City yang sedang berlangsung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan faktor yang mempengaruhi perilaku pada pekerja konstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan utama sebanyak 4 orang dan informan pendukung sebanyak 2 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi visual dan wawancara langsung. Pembahasan dalam penelitian ini akan membandingkan antara temuan visual di lapangan dengan Standar Proteksi Keselamatan dan Perlengkapan Kerja Proyek PT. NKE.

1.3 Keaslian Tugas Akhir

Menurut pengamatan penulis dari referensi tugas akhir yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan internet dengan basis situs pencari <http://www.google.com>, tugas akhir dengan topik Analisis Kondisi dan Perilaku Pekerja Konstruksi terhadap Implementasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum pernah dibuat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi dan perilaku pekerja konstruksi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan proyek konstruksi.
2. Mengetahui faktor penghambat pekerja dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan proyek konstruksi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan konstruksi terutama bagian K3L dalam mengenali kondisi dan perilaku pekerja konstruksi yang diharapkan akan mempermudah dalam membuat pelatihan, kebijakan, dan peraturan yang berhubungan dengan implementasi sistem K3.

2. Sebagai informasi dan dokumentasi data penelitian serta dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian serupa. Memberikan masukan dalam mengembangkan keilmuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terutama mengenai kondisi dan perilaku pekerja konstruksi.

